

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP NILAI INFORMASI
PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH
(Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten
Kendal)**

Rizal Pramudiarta, Agung Juliarto¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This research is conducted to investigate the factors that affecting the information value of accounting entity financial reporting. The factors under investigation are the human resources competency, information technology, and government internal control system.

Data were collected using questionnaire survey. The questionnaires were delivered to 65 employees of local government units (SKPD) Batang Regency and Kendal Regency specifically at financial / accounting department. A total of 65 questionnaires (100%) were returned and can be processed. The data were processed using SPSS version 19.0. The multiple linear regression analysis was employed to test research hypotheses.

The results of hypothesis testing show that human resource competency, and the government internal control system have significant positive effects on the information value of accounting entity financial reporting. Whereas the use of information technology has no a positive effect on the information value of accounting entity financial reporting.

Keywords: information value of local government financial reporting, human resource competency, information technology, government internal control system.

PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pemerintah adalah entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena: (1) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (2) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (3) terdapat pemisahan antara manajemen dan kepemilikan sumber-sumber tersebut (Partono, 2000). Dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP disebutkan beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah namun tidak terbatas pada: (1) masyarakat, (2) wakil rakyat, lembaga

¹Corresponding author

pengawas, dan lembaga pemeriksa, (3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta (4) pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian suatu laporan keuangan. Terhadap 456 LKPD Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD sebagaimana disajikan dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1
Opini LKPD Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP	Total
2009	1	24	3	5	33	7	240	37	95	379	7	66	8	11	92
	3%	73%	9%	15%	100%	2%	63%	10%	25%	100%	7%	72%	9%	12%	100%
2010	6	22	0	5	33	16	254	23	103	396	12	67	3	11	93
	18%	67%	0%	15%	100%	4%	64%	6%	26%	100%	13%	72%	3%	12%	100%
2011	10	19	0	4	33	36	268	6	89	399	21	62	2	7	92
	30%	58%	0%	12%	100%	9%	67%	2%	22%	100%	23%	67%	2%	8%	100%
2012	17	11	0	15	33	72	256	6	67	401	31	52	0	7	90
	52%	33%	0%	15%	100%	18%	64%	1%	17%	100%	34%	58%	0%	8%	100%
2013	15	12	0	2	29	102	214	9	14	339	36	50	0	2	88
	52%	41%	0%	7%	100%	30%	63%	3%	4%	100%	41%	57%	0%	2%	100%

Sumber : www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2014

Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat vital. Salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya.

Tuntutan perbaikan dalam pelaporan keuangan pemerintah harus dijawab dengan perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan. Amran (2009) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu instansi. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya akan mampu mempengaruhi nilai informasi akuntansi pada pelaporan keuangan.

Saat ini teknologi informasi berkembang sangat pesat sehingga dengan teknologi informasi ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta dapat menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik karena masih sedikit situs web pemerintah daerah yang *update* mengenai informasi keuangannya.

Sistem pengendalian intern juga merupakan salah satu kriteria pemberian opini yang diberikan oleh BPK. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2014 yang diterbitkan BPK menyatakan pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern meliputi lima unsur pengendalian, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi

dan komunikasi, serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Populasi penelitian ini difokuskan pada SKPD Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. Alasan penggunaan populasi ini karena provinsi Jawa Tengah dinilai berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan hasil audit BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2013 di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi, menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah tahun yang sama pula, tidak banyak yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nilai informasi pelaporan keuangan, yaitu: Indriasari dan Nahartyo (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), Arfianti (2011), dan Sukmaningrum (2012). Mengacu pada penelitian terdahulu, bahwa terdapat perbedaan hasil beberapa penelitian di atas telah mendorong untuk dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah?
3. Apakah SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah?

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan.

Teori *stakeholder* mengungkapkan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya untuk kepentingan sendiri namun harus dapat memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh oleh dukungan yang diberikan dari *stakeholder* yang ada dalam perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Teori *stakeholder* umumnya merupakan teori bagi perusahaan sektor swasta. Akan tetapi pada kenyataannya sudut pandang teori ini dapat diterapkan pada sektor publik, dan sebagian pula diterapkan dalam konteks keputusan manajerial dalam pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu nilai informasi pelaporan keuangan dengan variabel bebas yaitu sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern.

Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah

Perubahan yang akan dilakukan untuk membenahi sistem pemerintahan terutama terkait dengan bidang akuntansi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kompetensi yang memadai, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Walaupun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi bisa jadi kualitasnya buruk. Informasi yang

dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, salah satunya sebagaimana yang masih banyak ditemui dalam pelaporan keuangan pemerintah (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasipelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai InformasiPelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah

Hamzah (2009) dalam Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menyatakan bahwa pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

Suatu entitas akuntansi seperti pemerintah daerah, sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi mesti akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Indriasari dan Nahartyo, 2008).Berdasarkan uraian diatas, hipotesis keduadari penelitian ini adalah:

H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasipelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai InformasiPelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah

Sukmaningrum (2012) menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.Salah satu kriteria pemberian opini laporan keuangan adalah evaluasi atas evektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).Berdasarkan uraian diatas, hipotesis ketigadari penelitian ini adalah:

H₃: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap nilai informasipelaporan keuangan entitas akuntansipemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Data Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui metode survei dengan kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *samplingkuota*karena besarnya populasi, yaitu pada pegawai SKPD di dua kabupaten.. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. Hal ini dikarenakan Provinsi Jawa Tengah dinilai berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan hasil audit BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2013 di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi, menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah ditahun yang sama pula, tidak banyak yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya.

Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai informasipelaporan keuangan, variabel kompetensi SDM, variabel pemanfaatan teknologi informasi, dan variabel sistem pengendalian intern.. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut, diadopsi dari penelitian-penelitian terdahulu dan telah banyak digunakan peneliti sebelumnya.

Variabel nilai informasi pelaporan keuangan diukur menggunakan kuesioner dengan 7 pertanyaan yang dikembangkan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008). Variabel tersebut diukur menggunakan skala lima poin atau skala likert, di mana skala rendah (1) menunjukkan rendahnya nilai informasi pelaporan keuangan dan skala tinggi (5) menunjukkan tingginya nilai informasi pelaporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur menggunakan kuesioner dengan 10 pertanyaan dengan skala Likert 1-5.

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010). Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur menggunakan kuesioner dengan 8 pertanyaan dengan skala Likert 1-5.

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian Intern diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Ramandei (2009). Jumlah item pertanyaan adalah 9 item dengan skala Likert 1-5.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Untuk menentukan responden, metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah *kuota sampling*. *Sampling kuota* adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 2011). Kelebihan *sampling kuota* adalah praktis karena jumlah responden sudah ditentukan diawal, data lebih mudah dan cepat digunakan (Sekaran, 2006).

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari empat pengujian, yakni uji kualitas data, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji model. Uji kualitas data digunakan untuk menentukan apakah data yang diperoleh dapat dikatakan sesuai. Kualitas data yang dihasilkan dari jawaban responden dapat berdampak pada ketepatan uji hipotesis. Uji kualitas data pada penelitian ini meliputi uji reliabilitas dan uji validitas. Uji statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data. Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai data melalui rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah tidak terdapat penyimpangan serta terdistribusi normal. Uji model terdiri dari uji koefisien determinasi, uji regresi berganda, dan uji t. Uji regresi digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Adapun persamaan regresi untuk seluruh variabel adalah sebagai berikut:

$$\text{NIPK} = \alpha + \beta_1 \text{SDM} + \beta_2 \text{TI} + \beta_3 \text{SPI} + e$$

Keterangan:

NIPK : Nilai informasi pelaporan keuangan
SDM : Kompetensi sumber daya manusia
TI : Pemanfaatan teknologi informasi
SPI : Sistem pengendalian intern
e : *error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner untuk bagian akuntansi atau keuangan SKPD Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. Kuesioner didistribusikan untuk kepala dan staf bagian akuntansi atau tata usaha keuangan. Jumlah SKPD yang digunakan sebagai sampel sebanyak 11 SKPD pada Kabupaten Batang dan 10 SKPD pada Kabupaten Kendal. Dengan demikian diperoleh 21 SKPD. Dari seluruh kuesioner yang telah disebar diperoleh 65 kuesioner. Hasil pengumpulan data (kuesioner) secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2
Rincian dan Pengembalian Kuesioner

	Kabupaten Batang	Kabupaten Kendal	Total
Kuesioner yang didistribusikan	35	30	65
Kuesioner yang diterima (kembali)	35	30	65
Kuesioner yang tidak kembali	0	0	0
Kuesioner yang gugur (tidak lengkap pengisiannya) sehingga tidak dapat diolah	0	0	0
Kuesioner yang valid (dianalisis)	35	30	65
Tingkat Pengembalian (<i>Respon Rate</i>)	100%	100%	100%

Sumber : data primer diolah, 2015.

Dari seluruh 65 kuesioner yang telah dianalisis, karakteristik sampel responden dapat dilihat pada tabel 3berikut ini.

Tabel 3
Karakteristik Sampel (n=65)

Wilayah Karakteristik	Kabupaten Batang (n=35)		Kabupaten Kendal (n=30)		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Usia						
- ≤ 30 tahun	3	8.5	7	23.3	10	15.4
- 31 - 40 tahun	14	40	11	36.7	25	38.5
- 41 - 50 tahun	11	31.5	7	23.3	18	27.7
- ≥ 51 tahun	7	20	5	16.7	12	18.4
Jumlah	35	100	30	100	65	100
Jenis Kelamin						
- Pria	21	60	13	43.3	34	52.3
- Wanita	14	40	17	56.7	31	47.7
Jumlah	35	100	30	100	65	100
Pendidikan						
- SMA	5	14.3	8	26.7	13	20
- D3	3	8.5	6	20	9	13.8
- S1	26	74.3	14	46.7	40	61.6
- S2	1	2.9	2	6.6	3	4.6
Jumlah	35	100	30	100	65	100
Jabatan						
- Kasubbag	10	28.6	8	26.7	18	27.7
- Staf	25	71.4	22	73.3	47	73.3
Jumlah	35	100	30	100	65	100
Masa Kerja						
- 1 - 2 tahun	-	-	3	10	3	4.6
- 3 - 4 tahun	3	8.5	6	20	9	13.8
- ≥ 5 tahun	32	91.5	21	70	53	81.6
Jumlah	35	100	30	100	65	100

Sumber : data primer diolah, 2015.

Berdasarkan pada tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berumur antara 31 tahun hingga 40 tahun yaitu sebesar 25 orang atau 38,5%. Penjelasan tersebut memberikan indikasi bahwa responden yang bekerja masih banyak tergolong usia produktif. Hal itu karena umur merupakan faktor yang menunjang potensi seseorang untuk berkembang lebih maju dalam memantapkan pekerjaannya. Sebanyak 65 responden yang terdiri dari kepala dan staf bagian akuntansi atau tata usaha keuangan, 52,3% berjenis kelamin laki-laki yaitu 34 responden dan 31 responden atau 47,7% berjenis kelamin perempuan. Dalam penelitian ini sebagian besar responden yang merupakan staf keuangan dan akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal adalah laki-laki.

Penjelasan tabel 3 di atas juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan S1 yaitu 40 responden atau 61,6%. Latar belakang pendidikan SDM yang memadai dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk masa kerja, sebagian besar responden telah bekerja selama 5 tahun keatas yaitu sebesar 53 orang atau 81,6%.

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4. Rentang teoritis didapatkan dari nilai asli kuesioner. Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki 10 item pertanyaan, variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki 8 item pertanyaan, variabel sistem pengendalian intern memiliki 9 item pertanyaan, dan variabel nilai informasi pelaporan keuangan memiliki 7 item pertanyaan. Sedangkan rentang aktual didapatkan dari jawaban responden.

Dari tabel menunjukkan bahwa variabel nilai informasi pelaporan keuangan mempunyai rata-rata empiris sebesar 30,66 di atas rata-rata teoritisnya sebesar 21, maka bisa disimpulkan bahwa persepsi pegawai SKPD Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerahnya di atas rata-rata. Variabel kompetensi SDM mempunyai rata-rata empiris sebesar 40,53 di atas rata-rata teoritisnya sebesar 30, maka bisa disimpulkan bahwa persepsi pegawai SKPD Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal terhadap kompetensi SDM pada pemerintah daerahnya di atas rata-rata. Variabel pemanfaatan TI mempunyai rata-rata empiris sebesar 32,66 di atas rata-rata teoritisnya sebesar 24, maka bisa disimpulkan bahwa persepsi pegawai SKPD Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal terhadap pemanfaatan TI pada pemerintah daerahnya di atas rata-rata. Variabel sistem pengendalian intern mempunyai rata-rata empiris sebesar 38,35 di atas rata-rata teoritisnya sebesar 27, maka bisa disimpulkan bahwa persepsi pegawai SKPD Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal terhadap sistem pengendalian intern pada pemerintah daerahnya di atas rata-rata.

Tabel 4
Deskripsi Variabel

Variabel	Rentang Teoritis			Rentang Aktual		
	Min	Maks	Rata-rata	Min	Maks	Rata-rata
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan	7	35	21	21	35	30,66
Kompetensi SDM	10	50	30	27	50	40,53
Pemanfaatan TI	8	40	24	17	40	32,66
Sistem Pengendalian Intern	9	45	27	25	45	38,35

Sumber : data primer diolah, 2015

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji reliabilitas dan uji validitas. Uji validitas dilakukan dengan analisis *bivariate* yakni melihat korelasi antara masing-masing indikator dengan total skor konstruk yang dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dalam hal ini adalah jumlah sampel. Dalam penelitian ini, jumlah sampel (n) adalah 65, sehingga besarnya df yaitu 65-2 = 63, dengan signifikansi 5%

didapat r tabel = 0,2441. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka dapat dikatakan semua indikator variabel adalah valid.

Sementara uji reliabilitas dimaksudkan untuk menentukan tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima. Uji reliabilitas instrumen penelitian dilaksanakan dengan melihat konsistensi koefisien *Cronbach Alpha* untuk semua variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2011). Berdasarkan tabel 5, nilai *Cronbach Alpha* diketahui lebih besar dari 0,70. Hal ini berarti instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan	0,863	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,830	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,859	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0,844	Reliabel

Sumber : data primer diolah, 2015

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan tiga jenis uji asumsi yaitu pengujian normalitas dilakukan dengan uji kolmogorov–smirnov yang dilakukan terhadap nilai residual (Ghozali, 2011). Pengujian multikolinieritas dilaksanakan untuk menguji model regresi apakah ada atau tidak korelasi antar variabel bebas. Pengujian heterokedastisitas, tujuannya adalah agar model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain, sehingga dapat dilakukan ke uji selanjutnya. Berikut ini disajikan hasil uji asumsi klasik.

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,5922201
Most Extreme Differences	Absolute	,106
	Positive	,047
	Negative	-,106
Kolmogorov-Smirnov Z		,858
Asymp. Sig. (2-tailed)		,453

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,858 dengan nilai probabilitas signifikan pada 0,453. Hal ini menandakan bahwa H_0 diterima, yang berarti data residual terdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi klasik, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak untuk dipakai dalam penelitian ini.

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

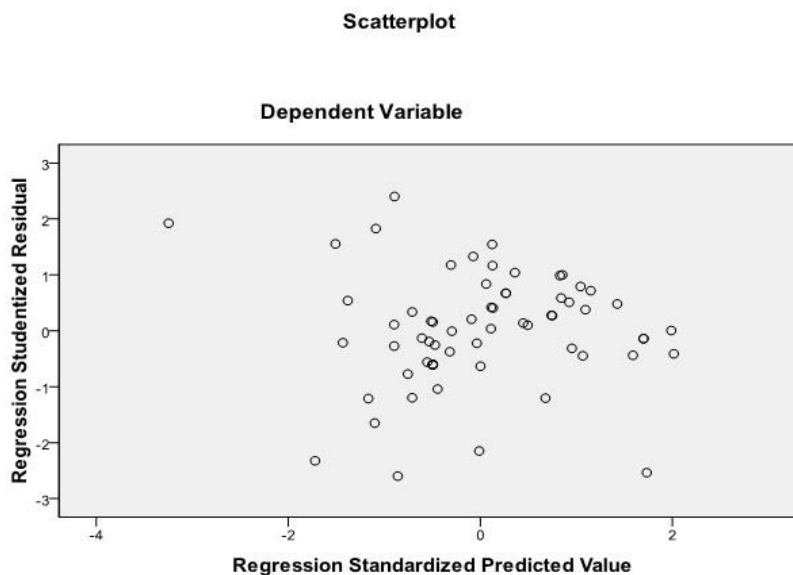
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Kompetensi SDM	0,643	1,554
Pemanfaatan TI	0,712	1,405
SPI	0,614	1,628

a. Dependent Variable: Nilai Informasi PK

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel koefisien di atas menunjukkan bahwa pada pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah, nilai toleransi lebih besar dari nilai default yang ditentukan sebesar 0,10. Sedangkan untuk nilai VIF juga menunjukkan di bawah angka 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah memenuhi persyaratan ambang toleransi dan nilai VIF, artinya bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi laporan keuangan tidak terjadi problem multikolinieritas, sehingga dapat dilakukan pada pengujian selanjutnya.

Gambar1
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi laporan keuangan tidak terjadi problem heteroskedastisitas. Hal ini dibuktikan dengan titik-titik yang menyebar secara acak serta menyebar tinggi di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y yang tidak teratur dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga disimpulkan bahwa uji ini tidak terjadi problem heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas juga dilakukan berdasarkan uji statistik yaitu dengan uji Glejser yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolute dari unstandardized residual dengan variable bebas. Hasil uji Glejser adalah sebagai berikut.

Tabel 8
Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.617	2.268		3.358	.001
SDM	-.066	.054	-.187	-1.234	.222
TI	-.010	.053	-.027	-.190	.850
SPI	-.069	.071	-.152	-.978	.332

a. Dependent Variable: NIPK

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Uji Model

Uji model pada penelitian ini meliputi uji koefisien determinasi dan uji regresi berganda. Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Pengolahan data yang dilakukan memberikan nilai adjusted R^2 sebesar 0,384. Hal ini berarti variabilitas variabel dependen (nilai informasi laporan keuangan) yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen (kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern) sebesar 38,4%. Sedangkan sisanya 61,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti.

Uji regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2011). Tabel 9 berikut menunjukkan hasil uji regresi linier berganda.

Tabel 9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,988	3,644		2,192	0,032
SDM	0,219	0,086	0,312	2,547	0,013
TI	-0,083	0,086	-0,112	-0,963	0,339
SPI	0,43	0,114	0,471	3,766	0,000

a. Dependent Variable: NIPK

Sumber : Data primer diolah, 2015

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$\text{NIPK} = 7,988 + 0,219 \text{ SDM} + (-0,083 \text{ TI}) + 0,43 \text{ SPI} + e$$

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan bahwa:

1. Konstanta sebesar 7,988 menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh dari ketiga variabel independen dan faktor lain, maka variabel nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal adalah 7,988
2. Variabel kompetensi SDM mempunyai pengaruh sebesar 0,219 terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah.
3. Variabel pemanfaatan TI mempunyai pengaruh sebesar -0,083 terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah.
4. Variabel SPI mempunyai pengaruh sebesar 0,517 terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah.

Pembahasan Hasil Penelitian

Uji parameter individual atau uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 8, menunjukkan bahwa variabel SDM dan SPI menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi kurang dari 0,05. Variabel pemanfaatan TI menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan tingkat signifikansi di atas 0,05.

Hasil pengujian atas hubungan antara variabel kompetensi sumber daya manusia dengan nilai informasi pelaporan keuangan daerah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah positif. Kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia merupakan *human capital* di dalam organisasi. Persepsi pegawai SKPD Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal terhadap kompetensi SDM adalah baik. Hal ini bisa dilihat dari latar belakang pendidikan S1 sebesar 61,6% dan pengalaman kerja di atas 5 tahun sebesar 81,6%. Latar belakang SDM yang memadai dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Indriasari dan Nahartyo (2008) dan Zuliarti (2012) yang menyimpulkan kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, yang dalam penelitian ini adalah variabel nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah.

Hasil pengujian atas hubungan antara variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak secara signifikan memberikan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah yang lebih baik. Hasil pengujian hipotesis ini tidak sejalan dengan Indriasari dan Nahartyo (2008), Arfianti (2011), dan Zuliarti (2012) yang menghasilkan bahwa pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Tidak adanya pengaruh yang signifikan tersebut terjadi karena pemahaman pegawai terhadap teknologi informasi yang masih kurang serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, *hardware* maupun *software* yang menyebabkan masih sulitnya aparatur di daerah menyampaikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel, tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Pada SKPD Kabupaten Batang dan Kendal sebagian besar pegawai berumur antara 31 tahun hingga 40 tahun yaitu pada usia produktif. Akan tetapi persentase usia pegawai di atas 51 tahun juga tidak kecil, yaitu sebesar 18,4%. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja pegawai, karena umur merupakan faktor yang menunjang potensi seseorang untuk berkembang lebih maju dalam memantapkan pekerjaannya akibatnya tidak semua pegawai memahami penggunaan teknologi informasi seperti penggunaan internet dan pemanfaatan *software*.

Hasil pengujian membuktikan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung berbagai penelitian yang menjelaskan tentang tujuan dari sistem pengendalian intern yaitu memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), dan Sukmaningrum (2012) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern akuntansi

berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan yang merupakan unsur dari kualitas laporan keuangan.

Tabel 10
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis		Kesimpulan
H ₁	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah	Diterima
H ₂	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah	Ditolak
H ₃	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah	Diterima

Sumber : data primer diolah 2015

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal pada tahun 2015 dengan perolehan sampel menggunakan *sampling kuota* pada kepala dan staf bagian akuntansi atau tata usaha keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini, maka dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, kompetensi SDM berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Persepsi pegawai SKPD Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal terhadap kompetensi SDM adalah baik. Hal ini bisa dilihat dari latar belakang pendidikan yang tinggi dan lamanya pengalaman kerja. Latar belakang SDM yang memadai dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kedua, hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena faktor belum efektifnya pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pegawai SKPD Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal menganggap bahwa sistem pengendalian intern yang baik akan menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi yang baik.

Ada beberapa keterbatasan yang teridentifikasi dalam penelitian ini :

1. Penelitian ini dilakukan di dua wilayah Propinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. Penyampelan atas responden dilakukan secara *sampling kuota* sehingga penentuan sampel cenderung subyektif bagi peneliti. Selain itu, penelitian ini belum mencakup semua SKPD sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisir ke semua SKPD. Dengan kata lain validitas eksternal dari hasil penelitian ini masih cukup rendah.
2. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner tanpadilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan, sehingga mempengaruhi validitas hasil. Jawaban responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda jika data diperoleh dengan wawancara atau pertanyaan lisan.

REFERENSI

- Amran, 2009. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Departemen Sosial Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ichsan Gorontalo*, Vol. 4, No. 2, h. 2397-2413.
- Arfianti, Dita. 2011. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)". http://eprints.undip.ac.id/29808/1/Artikel_Jurnal1.pdf. Diakses 16 Oktober 2014
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2006. Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2014.
- Badjuri, A. dan Trihapsari, E., 2004, "Audit Kinerja Pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah". Fokus Ekonom, Vol. 3, No.2, pp. 27-32.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. Teori Akuntansi Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Griffin, Ricky. 2004. Manajemen. Jakarta: Gramedia.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Huda, Ulul. 2009. "Hubungan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Kekuasaan Lokal; Sebuah Penilaian Mengenai Dampak yang ditimbulkan", <http://ululbanyuwangi.blog.com/2009/10/16/hubungan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dengan-kekuasaan-lokal-sebuah-penilaian-mengenai-dampak-yang-ditimbulkan/>. Diakses 29 Oktober 2014
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPF
- Indriasari, D. dan E. Nahartyo., 2008, "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)", *Symposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.
- Ismiyati dan Ardhi Widiyanto. 2013. "Potret Akuntabilitas Keuangan Daerah di Jawa Tengah." <http://www.bpkp.go.id/%20jateng/konten/1912/Potret-Akuntabilitas-Keuangan-Daerah-di-Jawa-Tengah.bpkp>. Diakses 16 Oktober 2014.
- Lillrank, Paul. 2003. *The Quality of Information*. International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 20 No. 6, pp.691 – 703.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Partono. 2000. "Laporan Keuangan Pemerintah: Upaya Menuju Transparansi dan Akuntabilitas". Media Akuntansi. Edisi 14. Oktober. pp. 25-26.
- Peraturan Pemerintah, 2005. Sistem Informasi Keuangan Daerah. PP No. 56 Tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah, 2005. Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No. 58 Tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah, 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. PP Nomor 60 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah, 2010. Standar Akuntansi Pemerintah. PP Nomor 71 Tahun 2010.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004. tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004. tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004. tentang Pemerintah Daerah.
- Rianto, Dedi. 2007, "Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan di Sektor Publik", *Seminar Nasional Teknologi 2007*, Yogyakarta.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach*. Third Edition. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten dan Kota Semarang)". <http://eprints.undip.ac.id/35305/1/JURNAL.pdf>. Diakses 16 Oktober 2014
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. (BPFE, Yogyakarta).
- Sutaryo. 2011. "Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Dengan *E-Government System*." <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/2011/06/20/nilailaporankeuangan-pemerintah-dengan-e-government-system/>. Diakses 27 Oktober 2014.
- Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.
- Winidyaningrum, C. dan Rahmawati. 2010, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi", *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.